

## PERAN UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) UNTUK PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Riz Hilmi Daffa Wardhana, Hendra Maujana Saragih

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Nasional Jalan Sawo Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kota Jakarta 12520  
E-mail: rizophilmi@gmail.com, hendramaujanasaragih@civitas.unas.ac.id

### Abstract

*This study aims to provide an overview of the Myanmar government's discrimination against the Rohingya Muslim Ethnic, so that the Rohingya Muslim Ethnic left their country and then fled, so that UNCHR was given the responsibility to provide protection for Rohingya refugees and to describe Indonesia's response in resolving the ethnic conflict. Therefore, the author provides the formulation of the problem, namely: What is the role of UNHCR in the protection of Rohingya refugees in Indonesia? This research uses Human Security Theory, Then International Organization Theory, and the Responsibility to Protect Concept. To support the results of a more comprehensive research the author uses a qualitative approach research method. So that this study resulted in the finding that UNHCR will always provide treatment that upholds humanity to protect refugees and here it is discussed that Indonesia is a mediation. Second, the international community's response to the Myanmar government came from the United Nations. Serious human rights violations that have occurred in Myanmar have led to a high flow of refugees from Myanmar to countries in Southeast Asia, especially Indonesia.*

**Keywords:** Rohingya Muslims, Conflicts over Human Rights Violations, Discrimination, UNHCR, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa diskriminasi pemerintah Myanmar terhadap Etnis Muslim Rohingya, sehingga Etnis Muslim Rohingya meninggalkan negaranya kemudian mengungsi, sehingga UNCHR Diberikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan pengungsi Rohingya serta untuk menggambarkan respon Indonesia dalam menyelesaikan konflik etnis tersebut. Oleh karena itu penulis memberikan rumusan masalah yakni Bagaimana peran UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia? Penelitian ini menggunakan Teori Keamanan Manusia (*Human Security*), Kemudian Teori Organisasi Internasional, dan Konsep *Responsibility to Protect*. Untuk menunjang hasil penelitian yang lebih komprehensif penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Sehingga penelitian ini menghasilkan temuan bahwa UNHCR akan selalu memberikan perlakuan yang menjunjung tinggi kemanusiaan untuk melindungi parapengungsi dan disini dibahas bahwa Indonesia sebagai mediasi. Kemudian adanya Respon masyarakat internasional terhadap pemerintah Myanmar datang dari PBB. Pelanggaran HAM serius yang terjadi di Myanmar menyebabkan tingginya arus pengungsi dari Myanmar ke negara yang berada di kawasan Asia Tenggara utamanya Indonesia.

**Kata Kunci:** Muslim Rohingya, Konflik Pelanggaran HAM, Diskriminasi, UNHCR, Indonesia

## 1. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu faktor/kondisi yang melibatkan kekurangan kebutuhan pangan dan gizi. Jadi kemiskinan juga bisa disebut sebagai suatu garis nilai standar kebutuhan minimum, baik dari segi makanan, pendidikan, dan sektor lainnya yang disebut sebagai garis batas kemiskinan.

Dan ini menjadi salah satu pekerjaan pemerintahan, agar permasalahan kemiskinan ini tidak menjadi naik dari tahun ke tahun dan masyarakat minimal bisa mendapatkan kesejahteraan sosial dan kemiskinan dapat menurun angkanya. Dan dampak kemiskinan juga mulai dirasakan dari level individu, level masyarakat bahkan sampai level nasional. Sebagai contoh paparan tentang data kemiskinan yang ada di kota Bandung Warga miskin baru di Kota Bandung mengalami penambahan selama pandemi COVID-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, dari total penduduk sebanyak 2.444.160 jiwa, jumlah warga miskin bertambah 12.480 jiwa sejak tahun 2020 hingga 2021. Dikutip dari dokumen Kota Bandung Dalam Angka yang dipublikasikan BPS pada Februari 2022, jumlah warga miskin tahun 2020 awalnya mencapai 100.020 jiwa. Data itu kemudian bertambah pada 2021 menjadi total 112.500 jiwa warga miskin di Kota Bandung. Dalam data BPS, disebutkan persentase penduduk

miskin di Kota Bandung pada 2020 mencapai 3,38 persen. Data kemiskinan itu naik pada 2021 sebanyak 4,37 persen.

Dari data statistik tersebut bahwa angka kemiskinan di Bandung kian meningkat dari masa pandemi Covid 19. Pemerintah kota Bandung sudah berusaha meminimalisir angka kemiskinan tersebut agar angkanya menurun tetapi usaha pemerintah belum membuahkan hasil dan belum sesuai dengan ekspektasi yang ada di lapangan. Padahal masyarakat kota Bandung membutuhkan bantuan sosial agar masyarakat kota Bandung bisa hidup dalam taraf kesejahteraan yang ada.

Pemerintah perlu mengantisipasi perihal masalah kemiskinan yang ada di Kota Bandung. Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan ini maka akan fatal akibatnya dan berujung terciptanya masalah baru bagi pemerintah itu sendiri. Kemiskinan akan berujung pada persoalan politik, ekonomi dan sosial di masyarakat. Sehingga akan timbul kekacauan dan ketidakseimbangan pemerintah. Kemiskinan adalah masalah yang tidak bisa dianggap remeh bagi rakyat Kota Bandung, karena jika terus mengalami peningkatan, maka akan berakibat fatal bagi masa sekarang dan masa yang akan datang.

Jika tidak bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah Kota Bandung maka dampaknya akan sangat fatal, seperti akan banyak anak-anak yang akan putus sekolah, meningkatnya

angka pengangguran, menurunnya angka kualitas penerus, munculnya masalah kesehatan yang ada di masyarakat, dan yang paling parah adalah angka kriminalitas semakin tinggi.

Pemerintah juga melakukan upaya bagaimana masyarakat bisa menjalani aktivitas di masa pandemi covid 19 dan minimal menekan laju pertumbuhan covid 19 yang semakin hari semakin naik angkanya dan mampu mengelola sumber dengan baik dan tepat untuk menangani krisis dan dampak kemiskinan yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19.

Dan kurangnya implementasi yang optimal juga menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang terjadi saat ini. Dan itu tidak cukup hanya dengan mengurus masalah kesejahteraan materi tapi kesejahteraan sosial juga harus diperhitungkan, dengan meningkatkan kesejahteraan sosial tentu itu menjadi tanggung jawab bersama oleh pemerintah Kota Bandung.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya, (Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2009: 126). Untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka perlu dilakukan

penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran. Dalam konteks ini pemberdayaan ekonomi untuk penguatan masyarakat dalam mendapatkan gaji/upah yang memadai, untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, sehingga memperoleh peningkatan hasil secara ekonomi. Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional (Mubyarto, 2000: 263-264). Dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anggota keluarga merupakan bentuk potensi masyarakat yang digunakan untuk berpartisipasi pada pendidikan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan

pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisa efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada di Kota Bandung. dan mengkaji bagaimana tingkat kemiskinan berdasarkan jumlah, wilayah, dan tingkat keparahan kemiskinan di Kota Bandung. dan juga akan dipakai sebagai pembelajaran untuk kedepan nanti, yaitu merumuskan saran dan apakah yang dilakukan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif atau tidak dalam menanggulangi tingkat kemiskinan selama pandemi covid-19.

## **2. Objek dan Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang menggunakan penulisan untuk mengeksplor atau memotret situasi sosial yang ada dan akan diteliti secara

menyeluruh, luas dan lebih mendalam. Metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskriptifkan situasi tentang pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi masyarakat tentang angka-angka kemiskinan yang terjadi di kota Bandung. Sehingga hasil dari penulisan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data Untuk pengumpulan data-data diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

#### **a. Observasi**

Menurut Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat berpendapat bahwa observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penulisan. Teknik ini dapat memberikan gambaran kondisi yang memuaskan. Artinya memberikan gambaran menyeluruh apa adanya.

#### **b. Wawancara**

Menurut Ridwan (dalam Dewi Sadiyah 2005 : 120) wawancara adalah satu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari seumbernya. Teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara bebas yang diajukan kepada masyarakat.

### Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif yang secara tepat dan mendalam digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memeriksa semua data yang terkumpul, baik melalui observasi, wawancara, angket atau dokumentasi , termasuk dilakukan editing dan penyortiran terhadap data yang tidak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
- b. Membuat kategori-kategori data sesuai dengan jenis masalah yang akan dijawab dalam penulisan.
- c. Membuat tabulasi data, yakni membuat tabel-tabel dan memasukkan data ke dalam tabel-tabel tersebut sesuai dengan variabel-variabel pertanyaan dan item-item nya.
- d. Pembahasan data (hasil penulisan) sesuai dengan pendekatan penulisan yang dilakukan, kualitatif dan penulisan kualitatif pembahasan penulisannya dengan menggunakan prosedur kerja analisis kualitatif.
- e. Penafsiran terhadap hasil pembahasan data penulisan, sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap masalah-masalah penulisan yang dilakukan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan merupakan persoalan laten yang dihadapi Kota Bandung. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan kesenjangan kesejahteraan di antara warga kota. Pemerintah Kota Bandung, sebagai bentuk keseriusan, beberapa tahun lalu memutuskan untuk menambahkan frasa "Penanggulangan Kemiskinan" ke dalam salah satu dinas nya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, jumlah penduduk miskin Kota Bandung mengalami tren penurunan sejak tahun 2013. Dari 117.700 orang pada tahun tersebut, jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 ada di angka 85.670 orang.

Pada 2020, sesuatu yang tak biasa melanda Kota Bandung, dan juga seluruh dunia. Pandemi Covid-19 menghantam banyak sektor perekonomian. Jumlah penduduk miskin di tahun penuh kemalangan itu bertambah secara signifikan menjadi 100.020 jiwa. Data penambahan jumlah penduduk miskin ini menunjukkan betapa besar dampak yang dihasilkan pagebluk. Namun pada saat bersamaan, data ini juga menguak betapa masih rapuhnya sistem perekonomian dan pemerataan kesejahteraan di Kota Bandung. Banyak warga hidup dalam kerentanan.

Hingga 2022 ini, pandemi Covid-19 masih jauh dari usai. Bahkan gelombang penambahan kasus sedang puncak-puncaknya,

ditandai dengan jumlah harian kasus positif baru yang terus mencetak rekor terbanyak.

Berikut hasil data kemiskinan yang penulis peroleh dari data BPS tahun 2019-2021

	Indikator Kemiskinan		
	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	474448.00	500452.00	515396.00
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	84.67	100.02	112.50
Persentase Penduduk Miskin	3.38	3.99	4.37
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.53	0.61	0.78
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.14	0.13	0.24

Sumber : BPS Kota Bandung 2022

Berdasarkan hasil tersebut bisa dilihat dari data indikator kemiskinan yang penulis ambil dari BPS Kota Bandung Garis kemiskinan perkapita mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang asalnya dari tahun 2019 hingga 2021. Sementara Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan yang dari asalnya 84.67 % menjadi 112.50% di 2021. Persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 3.38 mengalami kenaikan tahun 2020 menjadi 3.39 dan dari tahun 2021 angkanya mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi 4.37. Indeks kedalaman kemiskinan berdasarkan data BPS tahun 2019 sebesar 0.53 mengalami peningkatan menjadi 0.61 dan di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 0.78.

Dari hasil data yang penulis paparkan diatas, kemiskinan di Kota Bandung akibat pengangguran masih sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu perlu adanya solusi bagaimana caranya agar kemiskinan di Kota Bandung tidak berdampak ke kehidupan selanjutnya karena itu akan sangat mempengaruhi kualitas

untuk generasi yang akan mendatang. Mengutip dari buku Get Succes Ekonomi, ada 3 kelompok pengangguran yang bisa dikatakan pengangguran yang mendapatkan upah tetapi dibawah standar upah minimum (UMR), penurunan produktitas pekerja, dan pekerja yang memiliki upah dibawah minimum yaitu 40 jam perminggu.

Penulis saat ini telah memaparkan hasil data dari BPS 2021 yang telah penulis dapatkan berikut data yang telah diperoleh :

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 11,46 persen Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 1.339.128 orang, naik 24.198 orang dibandingkan Agustus 2020. Sebanding dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan menjadi 65,31 persen. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 11,46 persen, naik 0,27 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.185.623 orang, meningkat sebanyak 17.774 orang dari Agustus 2020. Peningkatan kontribusi terbesar dari penyerapan penduduk bekerja terjadi pada lapangan pekerjaan Sektor Pertanian (0,01 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan kontribusi terbesar adalah Sektor Jasa (0,07 persen poin).

Sebanyak 500.580 orang (42,22 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,48 persen poin dibanding Agustus 2020. Terdapat 385.134 orang (18,78 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (40.803 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (11.428 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (17.288 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (315.615 orang). (Sumber :BPS 2021)

Dari statistik data tersebut tingkat penangguran dapat dihitung melalui cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang bisa dihitung dengan skala persen. Ketiadaan pendapatan yang diperoleh akan berdampak buruk karena harus mengurangi tingkat konsumsi yang menyebabkan terjadinya penurunan kemakmuran dan kesejahteraan. Terlalu lama menyandang status pengangguran itu akan membuat dampak psikologis yang buruk terhadap yang menganggur dan kepada keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi akan menyebabkan tidak seimbang antara politik keamanan dan juga sosial sehingga akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang terhambat.

### **Jenis Jenis Pengangguran**

Pengangguran menyebabkan timbulnya masalah pembangunan di Kota Bandung. dan itu akan mengganggu stabilitas kesejahteraan warga Kota Bandung. Ada berbagai jenis pengangguran yang muncul karena belum mendapatkan pekerjaan . berikut penulis paparkan faktor yang ditimbulkannya sebagai berikut :

#### **Pengangguran Konjungtur (Siklis)**

Penyebab terjadinya pengangguran konjungtural karena perubahan ekonomi yang sedang terjadi istilahnya bisa disebut mengalami resesi ekonomi (kemunduran) dan masa depresi (kehancuran).

Selain itu suatu perusahaan yang mengalami kerugian, sehingga perusahaan terpaksa harus mengurangi tenaga kerja. Hal ini berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para pekerja. Akibatnya jumlah penangguran menjadi meningkat.

#### **Pengangguran Struktural**

Penyebab terjadinya penangguran struktural adalah karena perubahan ekonomi dengan waktu yang begitu lama. Contohnya perubahan secara agraris menjadi ekonomi. Hal ini berdampak kepada tenaga kerja yang berkurang karena perubahan lowongan kerja yang ketat.

Akibat dari penangguran struktural ini muncul banyak pengangguran yang tidak sesuai dengan kebutuhan di bidang tersebut. Cara

untuk mengurangi tingkat pengangguran struktural ini adalah dengan menambah pendidikan dan latihan yang sesuai dengan bidang lowongan kerja tersebut.

#### Pengangguran Musiman

Jenis pengangguran musiman adalah yang berhubungan dengan ekonomi jangka pendek, misal dari sektor pertanian. Contohnya petani menganggur karena gagal panen atau menunggu musim panen dan musim tanam.

#### Pengangguran Friksional

Pengangguran Friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena seseorang yang belum memiliki pekerjaan. Penyebabnya karena pencari kerja tersebut kesusahan mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

### **Dampak Pengangguran**

Pengangguran akan berdampak pada pembangunan ekonomi di wilayah Kota Bandung. Jika angka pengangguran meningkat tinggi, dapat menghambat pembangunan ekonomi, berikut penulis paparkan tentang dampak pengangguran pada masyarakat Kota Bandung :

- Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan antara Sosial dan Politik  
Tingkat pengangguran yang meningkat dan banyaknya warga Kota Bandung yang kehilangan penghasilan. Dampaknya mereka akan melakukan segala upaya agar kebutuhan mereka tercukupi.

- Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tindak kriminal seperti, pencurian, perampokan, hingga pembegalan. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan ketidakpuasan masyarakat sehingga muncul konflik, unjuk rasa, dan huru-hara lainnya.
- Pengangguran Dapat Menghilangkan Keterampilan Individu  
Keterampilan yang dimiliki seseorang akan terus bertambah dan meningkat apabila terus digunakan. Ketika keterampilan tersebut digunakannya setiap hari sudah tentu akan ada pengalaman baru dari aktifitas yang dikerjakan. Sehingga tingkat keterampilan seseorang akan terus bertambah dan meningkat apabila dilakukannya setiap hari.

### **Cara Mengatasi Pengangguran**

Ada sejumlah cara yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Berikut ini di antaranya yang dikutip dari berbagai sumber:

- Membuka Lapangan Kerja  
Membuka lapangan kerja adalah hal utama untuk mengurangi pengangguran. Dengan adanya lowongan pekerjaan, maka orang yang tadinya menganggur akan melamar lowongan tersebut. Jika lowongan pekerjaannya banyak, maka peluang pencari kerja diterima juga semakin tinggi.

- Memperbaiki Kondisi Ekonomi Makro  
Pertumbuhan ekonomi akan merangsang penciptaan lapangan kerja dan memberi dampak positif bagi kaum muda yang sedang menganggur. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada sektor industri yang ramah terhadap pencari kerja muda untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.
- Program Pelatihan dan Pendidikan  
Program pelatihan dan pendidikan dengan tujuan pembentukan keterampilan dan pengembangan potensi dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terampil akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan seseorang yang tidak memiliki keterampilan.

tidak akan memikirkan pendidikan dan kesehatan karena yang dipikirkan hanya bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika manusia tidak memikirkan pendidikan, maka di masa depan taraf hidupnya akan sama seperti sekarang dan akan menyebabkan pengangguran meningkat. Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan sebab akibat yang sangat erat. Pertumbuhan ekonomi bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif yang bukan semata-mata hanya kesejahteraan material. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat dengan alokasi pengeluaran pemerintah untuk memakmurkan rakyat dalam suatu negara. Pemerintah sebagai regulator harus bijak dalam mengambil keputusan-keputusan yang mendukung kepentingan rakyat secara menyeluruh agar tercipta masyarakat yang sejahtera.

#### 4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan. Kemiskinan dan pengangguran mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengurangi Hal ini sesuai dengan data di lapangan bahwa kemiskinan dapat mempengaruhi sumber daya manusia karena masyarakat yang miskin

**Daftar Pustaka**

- Chalid, Nursiah, and Yusbar Yusuf (2014). "Pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau." *Jurnal ekonomi* 22.2 : 1-12.
- Harlik, Harlik, Amri Amir, and Hardiani Hardiani (2013). "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi." *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 1.2 : 109-120.
- Susanto, Edyson, Eny Rochaida, and Yana Ulfah (2018). "Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan." *Inovasi 13.1* : 19-27.
- Mahsunah, Durrotul (2013).. "Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1.3 .
- Ramdhan, Dahma Amar, Djoko Setyadi, and Adi Wijaya (2018). "Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota samarinda." *Inovasi 13.1* : 1-18.
- Paramita, AA Istri Diah, and IB Putu Purbadharmaja (2015). "Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 4.10 : 44574.
- Simanjuntak, Atmaezer Hariara, and Rudy G. Erwinsyah (2020). "Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 6.2 : 184-204.
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516-526.
- Rizki, M. (2021). Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Good Governance*, 17(2).

Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan Di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53-66.